

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020

Adetyas Nur Septiana Yolanda

ABSTRAK

Adetyas Nur Septiana Yolanda. 17010030. Analisis Laporan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020.

Analisis rasio keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 berdasarkan analisis rasio keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020 sebesar 493,65%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tergolong dalam kategori sangat efektif. Rasio efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020 sebesar 116,43% . Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tergolong dalam kategori tidak efisien. Rasio aktivitas keuangan daerah pada belanja rutin terhadap APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 sebesar 15,43%, sedangkan untuk rasio aktivitas keuangan daerah pada belanja pembangunan terhadap APBD sebesar 84,57%. Sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja modal dibandingkan belanja operasional sehingga rasio belanja operasional relatif lebih kecil. Rasio pertumbuhan PAD keuangan daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 sebesar -32,49%, rasio pertumbuhan pendapatan sebesar -32,49%, rasio pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 15,61%, dan rasio pertumbuhan belanja langsung sebesar -49,53%. Kinerja keuangan daerah cenderung ke arah pertumbuhan yang negatif.

Kata kunci : Analisis Laporan Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan.

ABSTRACT

Adetyas Nur Septiana Yolanda. 17010030. Financial Statement Analysis at the Public Works Office of Wonogiri Regency in 2020.

Financial ratio analysis is a number that shows the relationship between an element and other elements in the financial report. The formulation of the problem in this study is how the financial performance of the Wonogiri Regency Public Works Office in 2020 is based on financial ratio analysis. The research method used is descriptive quantitative. The results showed that the effectiveness ratio at the Wonogiri Regency Public Works Office for the 2020 fiscal year was 493.65%. This shows that the performance of the Wonogiri District Public Works Office is in the very effective category. The efficiency ratio at the Wonogiri Regency Public Works Office for the 2020 fiscal year is 116.43%. This shows that the performance of the Wonogiri Regency Public Works Office is in the inefficient category. The ratio of regional financial activities in routine expenditure to the APBD of the Wonogiri Regency Public Works Office of 2020 is 15.43%, while the ratio of regional financial activities in development spending to APBD is 84.57%. Most of the funds allocated from total expenditures are greater for capital expenditures than for operational expenditures so that the ratio of operational expenditures is relatively smaller. The regional financial PAD growth ratio of the Wonogiri Regency Public Works Office in 2020 is -32.49%, the revenue growth ratio is -32.49%, the indirect expenditure growth ratio is 15.61%, and the direct expenditure growth ratio is -49.53 %. Regional financial performance tends towards negative growth.

Keywords: Financial Statement Analysis, Effectiveness Ratios, Efficiency Ratios, Activity Ratios, Growth Ratios.

PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak Reformasi tahun 1998. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan baru dari Pemerintah Indonesia yang “mereformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang keuangan negara dan daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut berisi mengenai perlunya dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi), sedangkan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemda. Selanjutnya, peningkatan kemandirian pemerintahan daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal 4 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemda dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Pemda sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemda berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk

melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktivitas, serta rasio pertumbuhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 berdasarkan analisis rasio keuangan”.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2016).

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irfan Fahmi, 2012). Menurut Mardiasmo (2002) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu :

- a. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Analisis rasio keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan (Jumingan, 2011). Jenis-Jenis Rasio Keuangan adalah :

- a. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif, jika rasio efektivitas yang dicapai minimal 100%. Semakin

tinggi, semakin baik. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Susanto (2014)

b. Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau belanja untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik.

Tabel 2.2 Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Susanto (2014)

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan

(belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur besaran antara komponen penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri dimana penelitian ini membahas tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri menggunakan rasio keuangan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran yaitu dengan mempelajari, mengamati, dan menganalisa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang berlangsung saat ini atau saat lampau. Penelitian ini menjelaskan gambaran secara umum fakta dan aktual terhadap fenomena yang diteliti yaitu analisis kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan berupa rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Rumus Perhitungan :

a. Rasio Efektivitas

Penghitungan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dirumuskan menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan seratus persen.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi

Perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dirumuskan menggunakan perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran atau belanja dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan seratus persen.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan/Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

c. Rasio Aktivitas

Perhitungan Aktivitas Keuangan Daerah dirumuskan menggunakan perbandingan antara total belanja rutin/operasi dengan Total APBD dikali seratus persen dan total belanja pembangunan dengan APBD dikalikan seratus persen.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

$$= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

d. Rasio Pertumbuhan

Perhitungan pertumbuhan keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } \rho - \text{PAD tahun } \rho-1}{\text{PAD tahun } \rho-1} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pertumbuhan Total Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan th } \rho - \text{PAD th } \rho-1}{\text{Pendapatan th } \rho-1} \times 100\%$$

Keterangan :

Th = Tahun

p = Tahun yang dihitung

$p - 1$ = Tahun sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Efektivitas

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun 2020 jika dilihat dari rasio efektivitas tergolong dalam kategori sangat efektif yaitu sebesar 493,65%. Hal ini dilihat dari realisasi penerimaan lebih besar dari target penerimaan yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.663.607.037,00 sedangkan target penerimaan sebesar Rp 337.000.000,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri dari segi rasio efektivitas. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya (Susanto, 2019), maka kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri jauh lebih baik. Hal ini dilihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri sebesar 493,65% yang tergolong dalam kategori sangat efektif, sedangkan pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil sebesar 101,85% yang tergolong dalam kategori efektif. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri jauh lebih baik.

2. Rasio Efisiensi

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun 2020 jika dilihat dari rasio efisiensi tergolong dalam kategori tidak efisien yaitu sebesar 116,43%. Hal ini ditandai dengan rasio diatas 100%. Artinya untuk menghasilkan output yang optimal pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Biaya yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebesar Rp 193.698.269.579,00 sedangkan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.663.607.037,00. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya (Susanto, 2019), maka kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri jauh lebih tidak efisien. Hal ini dilihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa rasio efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Wonogiri sebesar 116,43% yang tergolong dalam kategori tidak efisien, sedangkan pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil sebesar 99,12% yang tergolong dalam kategori kurang efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan sama-sama terlalu besar. Penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah untuk mewujudkan kinerja keuangan daerah yang sesuai prinsip value for money yang ekonomis, efektif, dan efisien.

3. Rasio Aktivitas

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun 2020 jika dilihat dari rasio aktivitas terlihat bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja modal dibandingkan belanja operasional sehingga rasio belanja operasional relatif lebih kecil. Rasio belanja operasional sebesar 15,43% sedangkan rasio belanja modal sebesar 84,57%. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk belanja modal. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya (Susanto, 2019), hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rasio belanja operasional sebesar 78,89%, sedangkan rasio belanja modal sebesar 21,11%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio aktivitas lebih banyak dialokasikan untuk biaya operasional daripada biaya modal. Kondisi ini menunjukkan hasil yang berbanding terbalik antar keduanya. Sampai saat ini belum ada tolok ukur yang pasti besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal. Hal ini dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang, peranan pemda untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar.

4. Rasio Pertumbuhan

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun 2020 jika dilihat dari rasio pertumbuhan terlihat bahwa kinerja keuangan daerah cenderung ke arah pertumbuhan yang negatif. Besarnya rasio pertumbuhan PAD keuangan daerah

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 sebesar -32,49%, rasio pertumbuhan pendapatan sebesar -32,49%, rasio pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 15,61%, dan rasio pertumbuhan belanja langsung sebesar -49,53%. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, dan rasio pertumbuhan belanja langsung terlihat kurang baik dengan arah pertumbuhan yang negatif, sedangkan pada rasio pertumbuhan belanja tidak langsung dikategorikan sedang. Hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri. Pendapatan daerah Dinas Pekerjaan Umum Wonogiri sebagian besar hanya berasal dari retribusi daerah dan minimnya pendapatan dari sumber penerimaan yang lain sehingga pendapatan yang diterima pun tidak sebanding dengan belanja yang dikeluarkan. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya (Susanto, 2019), hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan pertumbuhan yang negatif yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan. Rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sama-sama perlunya meningkatkan jumlah pendapatan, baik pendapatan yang sudah ada atau menggali lagi potensi-potensi yang bisa dijadikan sumber pendapatan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Rasio efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020 sebesar 493,65%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tergolong dalam kategori sangat efektif karena persentase kinerja keuangan diatas 100%. Hal ini dilihat dari realisasi penerimaan lebih besar dari target penerimaan yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah semakin baik.

- 2) Rasio efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020 sebesar 116,43% . Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tergolong dalam kategori tidak efisien karena persentase kinerja keuangan diatas 100%. Artinya untuk menghasilkan output yang optimal pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang cukup besar.
- 3) Rasio aktivitas keuangan daerah pada belanja rutin terhadap APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 sebesar 15,43%, sedangkan untuk rasio aktivitas keuangan daerah pada belanja pembangunan terhadap APBD sebesar 84,57%. Sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja modal dibandingkan belanja operasional sehingga rasio belanja operasional relatif lebih kecil.
- 4) Rasio pertumbuhan PAD keuangan daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 sebesar -32,49%, rasio pertumbuhan pendapatan sebesar -32,49%, rasio pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 15,61%, dan rasio pertumbuhan belanja langsung sebesar -49,53%. Kinerja keuangan daerah cenderung ke arah pertumbuhan yang negatif. Rasio pertumbuhan PAD, pendapatan, dan belanja langsung mengalami penurunan yang sangat drastis, sedangkan untuk rasio belanja tidak langsung mengalami kenaikan.

2. Keterbatasan Penelitian

- 1) Tahun yang diteliti pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri hanya tahun 2020 saja, sehingga hasil kinerja keuangan tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Adanya keterbatasan data dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, sehingga rasio keuangan yang digunakan hanya rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

3. Rekomendasi

- 1) Pendapatan daerah Dinas Pekerjaan Umum Wonogiri sebagian besar hanya berasal dari retribusi daerah dan minimnya pendapatan dari sumber penerimaan

yang lain, maka dari itu sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri mencari sumber-sumber potensi yang bisa menambah pendapatan daerah.

- 2) Biaya yang dialokasikan untuk belanja terbilang cukup besar, maka dari itu penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah untuk mewujudkan kinerja keuangan daerah yang sesuai prinsip *value for money* yang ekonomis, efektif, dan efisien.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)*. <https://eprints.uny.ac.id/17846/1/Skripsi%20.pdf> (diakses tanggal 16 April 2021)
- Arumdari, Rindang. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan*. <https://core.ac.uk/download/pdf/225828012.pdf> (diakses tanggal 16 April 2021)
- Atmawati, Lilis. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)*. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1514/> (diakses tanggal 16 April 2021)
- Djanegara, H. M. S., SE, A., & MM, C. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Bogor: Kesatuan Press.
- Fahmi, Irfan. (2012). *Pengantar Manajemen Keuangan, Edisi Pertama*. Bandung: Alfabeta.
- Hakim, Mochammad Faishal. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016*. <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/6400/skripsi%20Analisis%20Kinerja%20Keuangan%20Pada%20Pemerintah%20Daerah%20Kab.pdf?sequence=1> (diakses tanggal 16 April 2021)

Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.

Jumingan. (2011). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Retno, A. (2018). BAB III METODE PENELITIAN. <http://repository.unpas.ac.id/36044/6/15.%20BAB%20III.pdf> (diakses tanggal 1 April 2021)

Sujarweni, V. Wiratna (2019). Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sukamulja, S. (2019). Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 7, 81-92.

Wijaya, D. H. (2020). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN (Doctoral dissertation, Universitas Ahmad Dahlan).

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

<http://dpu.wonogirikab.go.id/web>

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
EKSD 1.1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2020

Kode Rekening	Urutan	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
A.	PENDAPATAN	337.000.000,00	1.663.607.037,00	493,65	3.464.391.608,00
A.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	337.000.000,00	1.663.607.037,00	493,65	3.464.391.608,00
A.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	207.000.000,00	1.629.717.037,00	530,85	2.372.261.608,00
A.1.4.	Levi dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.000.000,00	33.690.000,00	112,30	90.130.000,00
B.	BELANJA DAERAH	207.339.180.881,00	193.698.369.579,00	93,43	371.333.783.845,55
B.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.725.969.600,00	11.191.335.189,00	81,53	9.679.796.814,00
B.1.1.	BELANJA PEGAWAI	13.725.969.600,00	11.191.335.189,00	81,53	9.679.796.814,00
B.2.	BELANJA LANGSUNG	193.613.211.281,00	182.506.934.390,00	94,26	361.653.986.031,55
B.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.513.173.000,00	1.261.275.000,00	83,35	1.343.969.000,00
B.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	192.100.038.281,00	181.235.739.390,00	94,32	358.310.017.031,55
B.2.3.	BELANJA MODAL	173.044.629.000,00	160.806.907.100,00	93,50	343.552.521.000,55
C.	SURPLUS/(DEFISIT)	(207.002.180.881,00)	(192.034.662.542,00)	92,77	(368.850.391.039,55)

Wonogiri, 31 Desember 2020

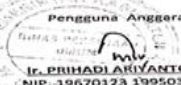
Pembuat Anggaran

D. PRIHADIRYANTO, MT
NIP. 19670123 199503 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SKPD : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2020

Dalam Rupiah					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN - LRA	337.000.000,00	3.663.607.037,00	493,88	2.464.391.808,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	337.000.000,00	3.663.607.037,00	493,88	2.464.391.808,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	307.000.000,00	1.629.717.037,00	530,85	2.372.261.808,00
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	30.000.000,00	33.890.000,00	112,97	92.130.000,00
2.	BELANJA	207.339.180.881,00	193.698.269.579,00	93,42	371.322.782.847,55
2.1.	BELANJA OPERASI	24.294.551.881,00	29.891.362.473,00	87,16	27.820.261.847,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	15.239.142.600,00	12.452.610.189,00	81,71	11.023.765.814,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.055.409.281,00	17.438.752.284,00	91,52	16.796.496.033,00
2.2.	BELANJA MODAL	173.044.629.000,00	163.806.907.106,00	94,68	343.502.521.000,55
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.209.000,00	116.955.000,00	98,95	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.409.720.000,00	1.386.955.000,00	98,39	-
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan	171.516.709.000,00	162.302.957.106,00	94,63	343.502.521.000,55
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	207.339.180.881,00	193.698.269.579,00	93,42	371.322.782.847,55
	SURPLUS/(DEFISIT)	(207.002.180.881,00)	(192.034.662.542,00)	92,77	(366.856.391.039,55)

Wonogiri, 31 Desember 2020

Pengguna Anggaran

Ir. PRIHADI ARIYANTO, MT
NIP. 19670123 199503 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SKPD : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019

Dalam Rupiah					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN	1.114.000.000,00	2.464.391.808,00	221,22	1.018.340.071,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.114.000.000,00	2.464.391.808,00	221,22	1.018.340.071,00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.054.000.000,00	2.372.261.808,00	225,07	833.860.071,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.000.000,00	92.130.000,00	153,55	184.480.000,00
2.	BELANJA DAERAH	395.672.025.949,00	371.322.782.847,55	93,85	200.957.663.983,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.210.768.152,00	9.679.796.814,00	79,27	9.503.069.186,00
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	12.210.768.152,00	9.679.796.814,00	79,27	9.503.069.186,00
2.2.	Belanja Langsung	383.461.257.797,00	361.642.986.033,55	94,31	191.454.594.797,00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.673.070.000,00	1.343.969.000,00	71,75	1.467.085.600,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.279.542.300,00	16.796.496.033,00	91,89	12.210.221.841,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	363.308.645.497,00	343.502.521.000,55	94,55	177.777.287.356,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(394.558.025.949,00)	(366.856.391.039,55)	93,49	(199.939.323.912,00)

Wonogiri, 31 Desember 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI


Ir. Prihadi Ariyanto, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19670123 199503 1002